



# SOAL ANGGARAN DAS AMPAL RP 80 MILIAR, INI PENJELASAN KEPALA DPU BALIKPAPAN



**TEKAN KENAIKAN HARGA BERAS DI  
BALIKPAPAN, DISDAG BAKAL GELAR  
PASAR MURAH**



Kepala Dinas PU Kota Balikpapan, Rita saat mengklarifikasi soal anggaran Rp 80 miliar untuk DAS Ampal.

## SOAL ANGGARAN DAS AMPAL RP 80 MILIAR, INI PENJELASAN KEPALA DPU BALIKPAPAN

**BALIKPAPAN** - DPRD Kota Balikpapan yang menyoroti adanya anggaran tambahan sebesar Rp 80 miliar untuk proyek penanganan banjir daerah aliran sungai (DAS) Ampal, ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita.

Rita yang mengklarifikasi adanya tambahan anggaran untuk DAS Ampal tersebut mengaku jika hal tersebut adalah keliru. Ia pun memastikan tidak ada penambahan anggaran Rp 80 miliar untuk proyek pengendalian banjir tersebut.

"Saya menginformasikan, tidak ada penambahan anggaran dalam pengerjaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Rita menjelaskan, anggaran yang dimaksud tersebut merupakan hasil penjumlahan dari yang tidak bisa diserap dari APBD Perubahan tahun 2021.

Adapun rincian skema pem-

biayaan DAS Ampal bersumber dari APBD tahun 2021 senilai Rp 20 miliar, APBD tahun 2022 senilai Rp 20 miliar, APBD Perubahan tahun 2022 senilai Rp 25 miliar, APBD tahun 2023 senilai Rp 50 miliar dan APBD Perubahan tahun 2023 senilai Rp 35 miliar.

"Jadi dari data yang ada, maka di akhir APBD Perubahan tahun 2023 ini senilai Rp 80 miliar, karena berdasarkan hasil penjumlahan dari yang tidak bisa diserap dari APBD Perubahan tahun 2021," jelasnya.

Rita menegaskan dalam proses pembiayaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal, setiap tahunnya sudah disepakati antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan.

"Saya pastikan tidak ada penambahan apapun dalam paket pekerjaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal ini. Nilainya tetap dari pagu awal yakni sebesar Rp 150 miliar," tegasnya.

"Saya punya hak untuk mengklarifikasi ini supaya tidak membias di masyarakat, karena di situ informasinya ada dana tambahan," tambah Rita.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan untuk membiayai skema pembiayaan proyek DAS Ampal. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan tahun 2023, yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Menurut Budiono, anggaran tersebut berasal dari Pemerintah Pusat, yang tentunya diberikan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Anggaran tersebut, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan multiyears untuk proyek DAS Ampal.

**Penulis: Aprianto**  
**Editor: Nicha Ratnasari**



Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi.

## DPRD DAN PEMKOT RANCANG PERDA PENANGGULANGAN LIMBAH B3

BALIKPAPAN - DPRD dan Pemkot Balikpapan saat ini sedang merencanakan membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait kedaruratan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di lingkungan Kota Balikpapan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan, rencana pembuatan Perda ini adalah bagian dari ikhtiar untuk penanggulangan limbah B3 agar dapat teridentifikasi dengan baik.

"Perda tersebut akan memudahkan pengambilan keputusan dalam hal penanganan dan penanggulangan B3," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, rancangan untuk Perda penanggulangan limbah B3 ini segera dapat selesai pembahasannya dan dapat segera disahkan menjadi Perda dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Balikpapan. Disebutkan Iwan, bahwa nantinya limbah akan dikelola oleh operator yang memiliki sertifikasi dan memiliki izin pemerintah baik provinsi maupun pusat.

"Limbah tersebut kalau bisa dimus-

nahkan di Balikpapan ya dimusnahkan. Tetapi kalau tidak bisa dimusnahkan maka akan dikirim keluar kota untuk dimusnahkan," jelasnya.

Jika Perda ini telah dibentuk, nantinya perusahaan memiliki deteksi dini jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dan sanksi akan berlaku jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pada peraturan yang dirancang nanti.

"Di tahun 2012 ada kejadian yang cukup besar saat itu minyak tumpah di teluk Balikpapan hingga ada korban jiwa. Efek jeranya juga bisa berujung pidana, sehingga perusahaan yang lalai bisa berdampak hukum pidana," tambahnya.

DPRD Kota Balikpapan pun telah mengundang pihak terkait untuk memberikan masukan agar Raperda ini bisa sesuai dengan kebutuhan.

"Doakan saja semuanya bisa berjalan sesuai tahapan dan rencananya. Jadi kita segera punya Perda Pengelolaan Limbah B3," tutupnya. (adv)

**Pewartu : Aprianto**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haerimusri Umar.

## TEKAN KENAIKAN HARGA BERAS DI BALIKPAPAN, DISDAG BAKAL GELAR PASAR MURAH

**BALIKPAPAN** - Harga beras yang terus mengalami kenaikan harga, kini sudah tak bisa dihindari. Pasalnya, Kota Balikpapan yang merupakan daerah yang sangag tergantung dengan komoditas dari luar pulau, selalu mengalami hal ini.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan, untuk kebutuhan beras selama ini Balikpapan masih bergantung pada daerah Surabaya dan Makassar.

"Memang kan selama ini kan kita itu masih tergantung dari Jawa (Surabaya) dan Sulawesi (Makasar) soal kebutuhan beras," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut Haemusri menjelaskan, jika daerah pemasok tersebut mengalami kendala dalam distribusinya ke Balikpapan tentunya bakal berdampak pada stok dan menyebabkan kenaikan harga.

"Saat ini cuaca lagi buruk, jadi ada keterlambatan pengiriman. Dan di sana (daerah

pemasok) juga ada gagal panen. Jadi jelas ini dampaknya ke kita, yaitu kenaikan harga tadi," jelasnya.

Namun bukan berarti Pemkot Balikpapan pasrah saja. Dalam waktu dekat Dinas Perdagangan akan mencoba menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga beras yang saat ini telah mengalami kenaikan.

"Kondisi seperti ini kan bukan baru ini terjadi, nanti kita akan gelar pasar murah beras. Kita gandeng Bulog dan instansi terkait lainnya," tambah Haerimusri.

Haemusri pun optimis harga beras di Kota Balikpapan bisa dikendalikan dengan cara menggelar pasar murah. "InsyaAllah bisa lah, kita sudah pernah kan melakukannya. Dan itu bukan cuma beras. Minyak, gula dan sebagainya pernah juga kita lakukan," tutupnya.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**

# DITUDUH LEMPAR BATU, ANAK 12 TAHUN DITENDANG TETANGGA HINGGA TERLUKA

**BALIKPAPAN** - Seorang warga Jalan Karang Jawa, Gang Melati RT 8, Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Utara bernama Siswanto (32) melaporkan tetangganya sendiri atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah anaknya sendiri.

Siswanto melaporkan tetangganya yang berinisial TG (40) lantaran diduga telah menendang anaknya berinisial ER (12), pada Sabtu (16/9/2023) sekitar pukul 19.00 Wita lalu.

Siswanto mengatakan, anaknya menjadi korban kekerasan tetangganya tersebut saat usai pulang dari masjid. Saat itu pelaku menuduh korban sebagai pelempar rumahnya menggunakan batu.

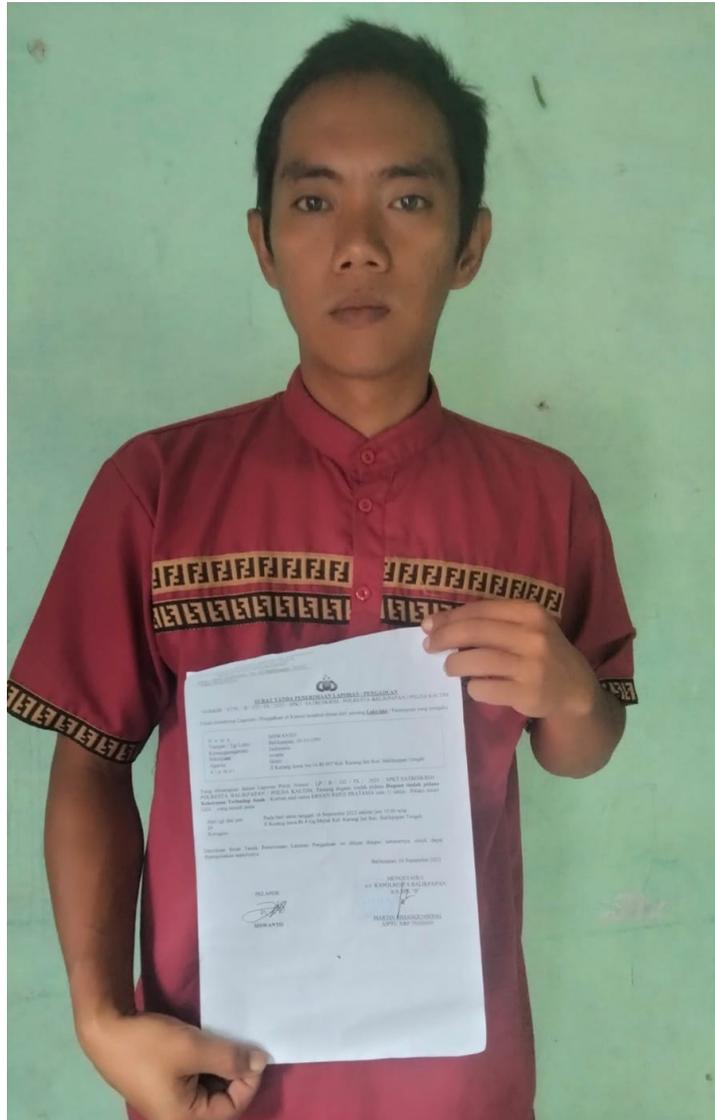
"Pas lewat depan rumahnya itu anak ku dikejar dan ditendangnya," ujar Siswanto saat ditemui Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut Siswanto menjelaskan, padahal saat itu anaknya sedang bersama temannya berinisial FR. Siswanto menduga, justru FR yang melempar atap rumah TG. Pasalnya anaknya sudah berjalan jauh melewati rumah pelaku. Sementara FR memang dikenal anak yang usil.

"Anak saya sudah bilang 'maaf, bukan saya', tapi tetap dikejar dan ditendang di kaki sebelah kanan," jelasnya.

Akibat ditendang itu, korban terlempar dan terseret. ER sempat jatuh dan terluka di bagian sikut dan kakinya. Meski terjatuh, ER masih terus berlari dan bahkan sampai nekat menyelinp ke rumah warga untuk menghindari kejaran pelaku.

"Saya sudah datengin dia (TG) di rumahnya dan berusaha komunikasi, mediasi lah ya kan, tapi dia bersikukuh membantah bahwa telah menendang anak saya," tambah Siswanto.



Siswanto, ayah korban menunjukkan surat laporan dari Unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya.

Siswanto mengklaim, TG berdalih ER terjatuh karena telah berlari kencang hingga menabrak pagarnya. Sebaliknya, lanjut Siswanto, ER pun juga bersikukuh menuding TG telah menendangnya sehingga terjatuh.

"Karena tak menemukan titik terang, akhirnya saya pilih proses hukum. Saya disarankan sama Pak Bhabinkamtibmas buat visum saja dulu," ujarnya lagi.

Dari hasil visum, ER mengalami luka memar di kaki dan sikut kanan. Lebih dari itu, rusuk korban juga ikut mengalami benturan. Siswanto pun telah melapor-

kan hal ini ke Polresta Balikpapan. Demikian untuk menagih pengakuan TG atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami ER.

Dikonfirmasi, Kanit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan, Ipda Iskandar Ilham membenarkan laporan tersebut. Untuk korban, sudah dimintai keterangan dan telah menjalani visum.

"Status perkaranya sementara masih dalam penyelidikan karena terlapor belum kita mintai keterangan," jawab Iskandar singkat.

**Penulis: Aprianto**  
**Editor: Nicha Ratnasari**



# TIBA DI PPU, MAKMUR: TERIMA KASIH TELAH DITERIMA



NIHIL TANGGAPAN MASYARAKAT,  
KPU PPU PROSES 355 BACALEG  
KE PENETAPAN DCT



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyampaikan sambutan pada ramah-tamah di Aula Islamic Center PPU, Rabu (20/9/2023).  
(Robbi/MediaKaltimGroup)

## TIBA DI PPU, MAKMUR: TERIMA KASIH TELAH DITERIMA

**PPU** - Makmur Marbun akhirnya tiba juga di PPU, Rabu (20/9/2023). Mengenakan baju putih, yang sudah terhiasi bordiran 'M Marbun' di sebelah kanan, dan 'Pj Bupati' di sebelah kirinya.

Agenda pertamanya ialah menghadiri pisah-sambut Bupati PPU periode 2018-2023. Acara ramah-tamah pengantar akhir masa bhakti Hamdam Pongrewa itu digelar di Aula Lantai I Masjid Al-Ikhlas Komplek Islamic Center.

Dalam kesempatan wawancara dengan awak media, Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat PPU. Termasuk ke jajaran pegawai di lingkungan Pemkab PPU.

Disampaikan seiring telah diterimanya dirinya beserta keluarga, di tempat tugas yang baru sebagai kepala daerah sementara Benuo Taka.

"Saya akan selalu berinterak-

si dengan bapak, ibu, siapapun itu. Termasuk kepada ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya yang ada di PPU. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih telah menerima saya beserta keluarga di Kabupaten PPU ini," ucapnya.

Menurutnya, hal itu sebagai kontribusi yang bisa dilakukan sebuah pimpinan terhadap seluruh masyarakatnya. Sementara dirinya, sambung Makmur, harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya datang ke sini karena ditugaskan Pak Presiden dan Pak Mendagri. Saya ini anak buah atau bawahannya Mendagri. Saya ditugaskan beliau di sini, bekerja dan memberikan laporan per tiga bulan sekali ke pada Mendagri yang menugaskan saya. Jadi amanah ini yang harus dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Secara khusus, Makmur juga menyampaikan ucapan terima

kasih beserta apresiasinya pada Hamdam. Yang dianggap telah berkontribusi terhadap kemajuan di PPU selama menjabat.

"Karena beliau sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat PPU. Saya harus mengucapkan terima kasih ke pada beliau, karena saya penerusnya. Apapun pekerjaan rumah yang belum selesai, saya siap melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut," katanya.

Di kesempatan yang sama, Bupati PPU sebelumnya, Hamdam didampingi istrinya, Satriyana Sirajuddin menyambut kedatangan pemimpin daerah baru penerusnya. Peralihan kekuasaan secara damai adalah suatu konsep penting bagi pemerintahan.

"Saya akhiri masa jabatan ini dengan tersenyum. Dan kita berharap siapapun yang menjadi pemimpin daerah ini agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya," tutup Hamdam.

**Pewarta : Nur Robbi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun

## **PJ BUPATI PPU BAKAL SELARASKAN KEBIJAKAN PEMKAB DAN PUSAT UNTUK KELANCARAN IKN**

PENAJAM - Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Makmur Marbun menyatakan bakal menyelaraskan kebijakan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat untuk kelancaran pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sebagian wilayah di daerah ini.

Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Makmur Marbun, di Penajam, Rabu (20/9/2023), adalah daerah asal dan kabupaten yang paling dekat dengan Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia.

Memperlancar proses pemindahan IKN Nusantara, lanjut dia, merupakan dukungan terhadap kebijakan nasional menyangkut rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, bakal menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemer-

intah kabupaten setempat.

Ia mengatakan proses pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara harus berjalan lancar karena prioritas nasional dan pemerintah kabupaten akan menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan lebih menjalin komunikasi dengan Otorita IKN agar dapat selaras menyukseskan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Indonesia, katanya.

Pj Bupati Makmur Marbun segera menjalin komunikasi dan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan seluruh perangkat pemerintah untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan.

Kemudian, kata dia, menjalin komunikasi dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersa-

ma-sama membangun Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Tugas lainnya yang harus dilaksanakan, yakni mempersiapkan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor melantik Makmur Marbun sebagai Penjabat Bupati Penajam Paser Utara menggantikan bupati sebelumnya, Hamdam Pongrewa, yang mengakhiri jabatan pada 19 September 2023 pada Selasa (19/9).

Makmur Marbun ditetapkan melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Penjabat Bupati lebih dari satu tahun hingga terpilihnya bupati definitif pada Pilkada 2024. (Ant/MK)

**Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan**

**Editor : Herry Soebanto**



Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU PPU, Tono Sutrisno. (Robbi/MediaKaltimGroup)

## NIHIL TANGGAPAN MASYARAKAT, KPU PPU PROSES 355 BACALEG KE PENETAPAN DCT

**PPU** - Sebanyak 355 bakal calon legislatif (bacaleg) Penajam Paser Utara (PPU) tengah berproses untuk masuk dalam daftar calon tetap (DCT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU saat ini masih melakukan verifikasi dan pencermatan.

Semenjak diumumkan, 19 sampai 23 Agustus lalu, diketahui KPU PPU sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apalagi laporan dari masyarakat. Waktu yang diberikan ialah sejak 19 sampai 28 Agustus.

"KPU sudah mengumumkan DCS, di media cetak, media sosial, website dan lain-lain, disertai dengan permohonan masukan dan tanggapan masyarakat. Namun sampai hari terakhir masa, masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada satu pun yang masuk," ujar Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU PPU, Tono Sutrisno, Rabu (20/9/2023).

Oleh karena itu, jumlah bacaleg dari hasil pleno DCS tidak berubah. Pun terkait pemenuhan syarat administrasi bakal calon, seperti ijazah, surat pengunduran

diri dari jabatan sebelumnya yang tidak dipersyaratkan, dan lainnya dapat dinyatakan tidak ada masalah.

"Ada 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, yang tidak ada tanggapan masyarakat, termasuk PPU. Jadi proses dilanjutkan ke persiapan penetapan DCT," sebutnya.

Meski begitu, Tono berharap pada proses selanjutnya tidak akan ada masalah lagi dan bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Sesuai jadwal, penetapan DCT dimulai dari pencermatan pada 24 September - 3 Oktober 2023.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan dan penetapan DCT mulai 4 Oktober 2023 sampai pengumuman DCT pada 4 November 2023.

"Tentu jika ada masalah di kemudian hari, maka akan dilakukan mekanisme sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tapi, semoga tidak ada masalah ataupun kendala," pungkas Tono.

**Pewarta : Nur Robbi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



## KUKARLAND FESTIVAL 2023 SIAP DIGELAR, GAPAI REKOR DAN BERKAH UNTUK EKRAF



**BALIHO BACALEG MENJAMUR, KETUA  
BAWASLU: BUKAN WEWENANG  
DALAM PENERTIBAN**



Istimewa

Rapat persiapan KugarLand Festival 2023 yang dipimpin Asisten II Setkab Kukar, Wiyono.

## KUKARLAND FESTIVAL 2023 SIAP DIGELAR, GAPAI REKOR DAN BERKAH UNTUK EKRAF

TENGGARONG - KugarLand Festival 2023 siap menghentak Kalimantan Timur (Kaltim). Tujuh artis ibu kota, siap manjakan semua jenis genre pecinta musik. Mulai dari musik jenis jazz, pop, dangdut, reggae, rock, metal, hingga indie pop. Dipastikan segala kalangan dan usia bakal memadati Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, sebagai venue yang sudah ditunjuk.

Kesiapan ini terlontar dari mulut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo. Setelah mengikuti rapat gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, yang dipimpin langsung Asisten II Setkab Kukar, Wiyono.

"Sesuai dengan hasil rapat KugarLand hari ini sudah mengeru-

cut artinya tidak ada kendala di lapangan," ujar Slamet.

Hal-hal teknis saja yang diklaim Slamet, masih perlu persiapan matang. Seperti kebersihan, keamanan dan peparkiran. Ini sangat penting. Fantor penunjang keberhasilan event pamungkas Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F).

Jelang perhelatan pada 22-23 September 2023 ini, total ada 3 agenda lagi yang sedang dikerjakan Dispar Kukar. Pertama, akan ada kolaborasi bagaimana penanganan kebersihan sampah yang ditinggalkan oleh penonton yang datang. Kedua, simulasi atau gladi di lokasi acara, memastikan acara sesuai dengan acara. Terakhir, mengundang OPD-OPD agar bisa ikut terlibat dalam percetakan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Diketahui, KugarLand Festival 2023 akan membuat rekor menggunakan Pesapu terbanyak dalam satu event. Sekedar informasi, Pesapu merupakan ikat kepala bercorak batik khas Kutai.

Kukar pun pernah dapat rekor dari MURI dalam hal event musik. Yakni gelaran musik rock gratis terbesar di Indonesia dalam rangkaian Kugar Rockin' Fest (2014). Juga ada pemecahan rekor menerbangkan lampion sebanyak 5.500 buah pada Festival Kota Raja ke-2 (2013).

Untuk kebersihan, akan melibatkan seluruh OPD di Kukar,

tanpa terkecuali dengan men-delegasikan beberapa staff. Untuk masalah perparkiran, Dishub Kukar yang akan jadi leading sector-nya. Nantinya bakal membagi masing-masing zonasi, agar alur lalu lintas dan mobilitas di venue dapat diatur.

Keberadaan toilet umum pun jadi faktor penting suksesnya gelaran KugarLand Festival 2023. Sudah menjalin komunikasi dan koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar. Mereka memiliki toilet portabel yang akan ditempatkan di beberapa lokasi.

Yang paling penting masalah sampah, selain meminta delegasi masing-masing OPD. Slamet pun memastikan Disperkim dan DLHK Kukar akan menyiapkan kantong sampah. Sembari memberikan edukasi kepada penonton yang datang, "tidak buang sampah sembarangan".

Tidak hanya memberikan berkah bagi pelaku UMKM, hotel-hotel juga kecipratan rezeki. Dari informasi yang didapat dari seluruh GM hotel di Tenggarong dan sekitarnya. Tanggal 22-23 September, seluruh kamar terisi penuh. Wajar saja, memang KugarLand Festival 2023 menargetkan penonton sebanyak 20-50 ribu yang datang menyaksikan.

"Artinya apa yang kita harapkan itu sudah tercapai," tutupnya.

**Penulis : Muhammad Rafi'i**  
**Editor : Nicha Ratnasari**



Ady/Radar Kukar

Kadispar Kukar, Slamet Hadiraharjo.

## H-2 Persiapan Festival KukarLand 2023 Makin Matang, Target 50 Ribu Penonton

**TENGGARONG** - Dua hari jelang pagelaran Festival KukarLand 2023, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kutai Kartanegara (Kukar), Slamet Hadiraharjo, menyebut persiapan semakin matang. Hanya menyisakan persiapan sarana pendukung seperti kebersihan, keamanan dan parkir.

Bahkan sarana pendukung ini sudah mulai disiapkan, ia mengatakan dalam hal pemenuhan sarana kebersihan pihaknya bakal melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk berkolaborasi mengatasi masalah kebersihan.

“Nanti mungkin dibatasi masing-masing OPD berapa staf yang diikutkan dalam pembersihan lokasi itu,” kata Slamet, Rabu (20/9/2023).

Bahkan, ia menambahkan bahwa untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ditimbulkan selama festival. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) bakal menyediakan tong sampah plastik dan memberikan edukasi pada pengunjung yang hadir.

Sedangkan untuk mengatasi masalah parkir saat festival berlangsung, Slamet mengatakan akan langsung diatur oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. “Untuk toilet kita juga sudah komunikasi dengan Disperkim karena mereka mempunyai portabel toilet kemudian dari panitia akan pinjam dari luar Kukar,” sambungnya.

Pagelaran musik yang akan berlangsung pada 22-23 September, dengan mengundang 8 artis kenamaan ibukota ini diyakini akan dibanjiri oleh penonton.

Diperkirakan akan ada sekitar 20-50 ribu pengunjung yang akan hadir selama Festival KukarLand 2023 berlangsung. Slamet pun merasa percaya diri, jika misi memecahkan rekor MURI mengenakan 10 ribu pesapu atau penutup kepala khas Kutai dalam festival ini akan tercapai.

“Kita juga akan membuat undangan untuk OPD agar dapat membantu terkait dengan MURI,” tutupnya.

**Penulis : Ady Wahyudi****Editor : Muhammad Rafi'i**



Tumpukan baliho yang ada di salah satu titik jalan di Kukur.

Ady/Radar Kukur

## Baliho Bacaleg Menjamur, Ketua Bawaslu: Bukan Wewenang dalam Penertiban

**TENGGARONG** - Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, sejumlah ruas jalan di Tenggara mulai dipadati dengan baliho dan spanduk tokoh yang bakal maju dalam kontestasi politik tersebut. Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukur), Teguh Wibowo, menyebut bukan kewenangan Bawaslu untuk melakukan penindakan.

Diketahui, spanduk-spanduk yang memuat foto figur dan slogan-slogan dukungan itu didominasi oleh para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) diberbagai tingkatan. Mulai dari DPRD kabupaten, provinsi hingga RI.

Teguh yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu ini menjelaskan, pihaknya belum dapat melakukan tindakan lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye. "Artinya kalau belum mulai pertandingan, wasit ini tidak punya kartu merah kartu kuning. Istilahnya begitu," kata Teguh.

Masa kampanye sendiri baru akan berlangsung sejak 28 November hingga 10 Februari 2024. Oleh sebab itu, Teguh berkata spanduk yang banyak dijumpai disepanjang jalan itu tidak bisa dikatakan sebagai Alat Peraga Kampanye (Algaka).

"Itu masih dikategorikan sebagai alat per-

aga sosialisasi saja, sama seperti banner iklan rokok dan lainnya," sambungnya.

Meski begitu bukan berarti pihaknya tidak melakukan apa-apa. Ia mengaku Bawaslu Kukur, tetap melakukan proses pencegahan. Dengan mengirimkan surat imbauan kepada seluruh partai politik (parpol). Agar tetap memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023, dalam melaksanakan sosialisasi.

"Karena di PKPU Nomor 15 itu ada konteks larangan dalam melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye," ungkapnya.

"Nah kalau banner-banner alat peraga sosialisasi itu kan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), yang menegaskan perda Bupati itu kan Satpol-PP. Jadi sementara ini masih kewenangan Satpol-PP untuk menertibkan itu," begitu terangnya.

Ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol-PP Kukur, untuk membahas khusus terkait dengan baliho-baliho Bacaleg yang mulai menumpuk di sepanjang jalan. "Kami intinya sudah koordinasi, tinggal eksekusinya nanti bagaimana kedepannya," pungkasnya.

**Penulis : Ady Wahyudi**

**Editor : Muhammad Rafi'i**



Anggota DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean.

## DPRD Kukar Minta Perusahaan Smelter Nikel di Sangasanga Maksimalkan Tenaga Lokal

**TENGGARONG** - Smelter Nikel di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, resmi beroperasi. Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan jajaran PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) secara kompak menekan tombol tanda peresmian-nya, Selasa (19/9/2023) kemarin.

Tentu ini menjadi investasi menjanjikan. Namun tak melulu berbicara investasi saja, harapan lainnya bisa ikut bermanfaat bagi wilayah operasi. Terutama membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi pekerja lokal.

Bahkan Bupati Kukar, Edi Damansyah, dengan mantap mengatakan, investasi senilai Rp 30 triliun ini diharapkan mampu menyedot 10 ribu tenaga pekerja lokal di Kukar. Khususnya masyarakat lokal di Kelurahan Pendingin tentunya.

Optimisme pun disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean. Sangat mengapresiasi dan mendukung penuh, serta akan terus mengawal keinginan orang nomor satu di Kukar tersebut.

"Jangan sampai mengabaikan tenaga kerja lokal. Artinya mereka perlu menjadi prioritas, tentu sesuai dengan kemampuan mereka, kalau perlu diberikan pembekalan

terlebih dahulu," ungkap Saparuddin.

Saparuddin menyebut ini menjadi tugas tambahan bagi Pemkab Kukar, bagaimana melatih dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar bisa berdaya di perusahaan tersebut. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat sekitar yang menjadi dampak dari sebuah pembangunan atau kebijakan itu harus dirasakan positif masyarakat.

"Pertama itu harus menyiapkan SDM, karena ini ranahnya pemerintah dengan OPD terkait diantaranya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar," lanjutnya.

DPRD Kukar pun akan memastikan pengawasan agar keinginan yang dilontarkan Pemkab Kukar bisa terlaksana. Terlebih saat ini Kukar sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal/Pengusaha Lokal. Regulasi itu mensosialisasikan kepada pihak perusahaan maupun calon tenaga kerja.

"Bisa difasilitasi menyamakan visi dan persepsi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan," tutupnya. (adv)

**Penulis : Muhammad Rafi'i**  
**Editor : Nicha Ratnasari**



Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian (baju batik hitam) saat meninjau jembatan di Rebaq Rinding. (Istimewa)

## Akses Jalan Jembatan Desa Rebaq Rinding Rusak, Sopan Sopian: Segera Dibangun

**TENGGARONG** - Warga Desa Rebaq Rinding, Kecamatan Muara Muntai, patut sedikit bahagia. Akses jalan desanya yang berupa jembatan kayu ulin, tepatnya di RT 07 yang belum juga tersambung, akan segera terealisasi. Yakni berupa pembangunan dari anggaran pokok pikiran (pokir) yang berasal dari anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Namun, dipastikannya tidak akan maksimal. Kucuran anggaran senilai Rp 200 juta, diperkirakan hanya mampu membangun jalan sepanjang 50 meter saja. Sehingga perlu dukungan dana lagi dari anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar. Agar menyelesaikan jalan sepanjang 250 meter lagi, dari total kebutuhan panjang jalan 300 meter.

"Itu menghubungkan ke (kantor) Kecamatan Muara Muntai," ujar Sopan Sopian, Rabu (20/9/2023).

Ia menginginkan Pemkab Kukar segera melihat kebutuhan ini. Sehingga akhir tahun ini jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat bisa terbangun dan dinikmati oleh masyarakat. Pokir yang masuk dalam perencanaan Desa Rebaq Rinding ini, dipastikannya akan terealisasi pada APBD Perubahan Kukar 2023.

Diketahui, jalan jembatan ini sebagai akses baru pengganti jalan akses lama yang terdampak abrasi sungai. Pembangunan yang ada pun hanya baru berasal dari dana desa. Dan sangat besar penganggaran melalui skema tersebut. Sehingga mau tidak mau tetap menggunakan akses lama yang sudah terbilang rusak. Yakni berlubang dan hancur-hancur.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dari kebutuhan masyarakat melalui infrastruktur jalan jembatan," tutupnya. (adv)

**Penulis : Muhammad Rafi'i**

**Editor : Nicha Ratnasari**



# 2.419 PENDUDUK BONTANG TELAH AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

**BACA HALAMAN A2**



## DPPKB Catat 87 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak hingga Agustus 2023



Ilustrasi IKD

IST

# 2.419 Penduduk Bontang Telah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

**BONTANG** - Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah mulai digunakan sebagian kecil masyarakat Bontang. Hal tersebut diungkapkan Kabid Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bontang, Muhammad Thamrin.

Terhitung sejak awal September sampai saat ini sudah 2 persen atau 2.419 warga Bontang telah melakukan aktivasi IKD. IKD merupakan KTP elektronik terdapat di dalam aplikasi yang bisa diakses menggunakan smartphone.

IKD dinilai sangat aman dan efektif untuk penggunaannya, karena selain menyimpan KTP kita, ia juga menyimpan beberapa berkas penting.

"Dalam aplikasi tersebut tidak han-

ya KTP, ada juga Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin Covid-19, NPWP, BPJS, DPT Pemilu 2024," jelasnya.

Selain menyimpan surat-surat penting, di dalam aplikasi tersebut masyarakat juga bisa mengurus KK atau KTP melalui aplikasi tersebut tanpa harus langsung ke Disdukcapil.

"Aplikasi ini sebenarnya sangat memudahkan masyarakat kita, tapi memang kita harus menyebarkan ini secara bertahap," tambahnya.

Untuk keamanan aplikasi tersebut, Thamrin menjelaskan bahwa orang lain tidak mungkin bisa mengakses sembarangan, karena sudah dilengkapi oleh PIN untuk masuk ke aplikasi. Juga aplikasi ini tidak bisa

melakukan tangkapan layar.

"Sama kayak orang yang ngunci HP nya pake PIN, atau PIN ATM, itu kan cuma kita sendiri yang tahu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa internal Disdukcapil dan ASN akan menjadi langkah awal penerapan ini, dan internal disdukcapil sudah mencapai 100 persen dalam penerapannya.

"Untuk beberapa OPD kami sudah lakukan aktivasi, belum semua, kami lakukan ini sambil jalan, karena kebetulan tahun depan sudah pemilu, jadi kami juga sibuk perekaman KTP juga ini," bebernya.

**Penulis: Syakurah**  
**Editor: Yusva Alam**



YUSVA ALAM

Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang, Dedy Nugraha.

## Banyak Tukang Belum Peduli Sertifikasi, Dedy: Manfaatkan Pelatihan Gratis untuk Kebaikan Masa Depan!

BONTANG – Saat ini masih banyak tukang-tukang bangunan yang belum peduli pada sertifikasi, padahal ke depannya sertifikasi sangat dibutuhkan profesi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha saat diwawancara redaksi Radarbontang.com, Selasa (19/9/2023).

Diungkapkan Dedy, ke depannya sertifikasi hampir dibutuhkan di semua lini pekerjaan, seperti proyek-proyek konstruksi. Ke depan syarat agar bisa mengikuti tender proyek salahsatunya adanya sertifikasi, utamanya sertifikasi yang terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tak hanya insinyurnya saja yang harus tersertifikasi, namun tukang-tukangnya pun juga harus.

“Kalau tidak ada sertifikasinya bisa jadi gugur tendernya,” ujarnya singkat.

Dengan sertifikasi standar BNSP akan bisa digunakan di tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, bahkan digunakan untuk proyek atau bekerja di IKN.

Dikatakannya, seharusnya para tukang dapat memanfaatkan betul apabila ada pelatihan tersertifikasi gratis. Lantaran apabila mengikuti pelatihan mandiri biayanya cukup mahal.

“Masih ada yang tidak mengetahui fungsi sertifikasi di masa mendatang. Kata tukang tanpa sertifikat pun sekarang sudah bisa dapat pekerjaan. Seharusnya mereka bisa meninggalkan sebentar pekerjaan mereka, untuk ikut pelatihan yang waktunya paling lama 2 minggu,” bebarnya.

Sekali lagi pihaknya menyarankan kepada para tukang untuk memanfaatkan momen pelatihan tersertifikasi. Hal ini untuk kebaikan profesi mereka ke depannya. (al/adv)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Kepala DPPKB, dr Bahauddin bersama Wakil Wali Kota, Najirah dalam kegiatan manajemen kasus.

## DPPKB Catat 87 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak hingga Agustus 2023

**BONTANG** – Kepala DPPKB Bontang, dr Bahauddin mengatakan hingga Agustus 2023, DPPKB mencatatkan ada sebanyak 87 total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terdiri dari perempuan sebanyak 36 orang dan anak-anak sebanyak 51 anak.

Ia menerangkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak masyarakat dapat melaporkan langsung ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bontang.

"Ada 87 kasus hingga Agustus 2023, tahun 2022 ada sebanyak 110 kasus. Sudah mendekati angka di tahun sebelumnya.

Kasus meningkat karena adanya keterbukaan akses untuk melaporkan," kata dr Bahauddin, Rabu (20/9/2023).

Cara lain yang dilakukan DPPKB yakni dengan memberikan parenting kepada orang tua dan sekolah-sekolah dalam pencegahannya.

"Perlu dilakukan parenting di sekolah-sekolah," katanya.

Diketahui DPPKB juga bermitra dengan Layanan Penyedia Perlindungan Perempuan dan Anak dalam membantu untuk penanganan kasus kekerasan pada anak.

**Pewarta: Yahya Yabo**

**Editor: Nicha Ratnasari**



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

dr Anwar, SpKK, dokter spesialis kulit dan kelamin saat memberikan penyuluhan di RSUD.

## Pekan Kepedulian Penyakit Jamur, RSUD Taman Husada Berikan Penyuluhan kepada Masyarakat

BONTANG – Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memberikan penyuluhan awam mengenai infeksi jamur pada kuli kepada masyarakat yang sedang berobat atau berkunjung ke RSUD Taman Husada Kota Bontang.

Penyuluhan awam ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan pada Rabu (20/9/2023) bertempat di Lobby RSUD.

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr Anwar, SpKK, menjelaskan kegiatan penyuluhan dilaksanakan bersama tim promosi kesehatan RSUD kepada masyarakat atau pasien yang berobat ke RSUD. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka minggu kepedulian terhadap

penyakit jamur yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Seluruh Indonesia (Perdoski).

"Kegiatan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Taman Husada Bontang," kata dr Anwar saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023).

Selanjutnya, dr Anwar mengatakan sasaran dari penyuluhan mengenai penyakit jamur yakni masyarakat yang sedang datang berobat di rumah sakit dan memberikan materi mengenai infeksi jamur pada kulit.

"Audiensnya pasien yang sedang menunggu di lobi RS. Materinya mengenai infeksi jamur seperti kadas, kurap dan panu dan faktor penyebabnya hingga pengobatannya," jelasnya.

Dr Anwar menambahkan tujuan dilakukannya penyuluhan agar masyarakat agar paham dan mengetahui mengenai penyakit infeksi jamur serta menyelenggarakan pekan kepedulian terhadap penyakit jamur.

"Harapannya dengan pemberian pengetahuan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana gejala ketika terkena infeksi jamur pada kulit dan menghindari faktor risiko dan memberikan informasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat," pungkasnya.

Pemberian materi langsung diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan alat bantu flyer atau pamflet pencegahan penyakit kulit. (adv)

**Pewarta: Yahya Yabo**  
**Editor: Nicha Ratnasar**

IST  
ILUSTRASI KIA

## Kejar Target 100 Persen KIA, Disdukcapil Jemput Bola hingga Berikan Benefit

BONTANG - Sebanyak 72 persen anak berumur di bawah 17 tahun di Bontang, sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut Peraturan Kemendagri Nomor 2 Tahun 2016 wajib bagi anak usia tersebut membuat KIA.

Demi menempuh target 100 persen anak di Bontang memiliki KIA, Disdukcapil kerap menjemput bola, karena metode itu dinilai efektif agar anak cepat memiliki KIA.

"Misalnya seperti di kelurahan, kecamatan, dan kami juga biasanya membuka pelayanan di tempat yang ramai seperti expo," ungkap Kabid Piak dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin, Rabu (20/9/23).

Untuk sosialisasi terkait KIA sudah cukup banyak dilaksanakan, karena Disdukcapil selalu menyelipkan dan masuk ke acara-acara yang dihadiri oleh para ibu-ibu.

"Kayak waktu acara PKK, saya masuk dan mengedukasi," jelasnya.

KIA merupakan identitas mandiri anak. Biasanya identitas anak adanya di Kartu Keluarga. Sehingga anak-anak sudah dapat mengakses layanan publik tanpa menggunakan identitas

orang tuanya.

"Contohnya bisa saja mereka membuka tabungan sendiri," imbuhnya.

Pihak Disdukcapil masih berusaha mengajak para orang tua untuk meluangkan waktu, karena jika Disdukcapil yang menentukan jadwal para orang tua justru banyak yang tidak datang.

"Selain KIA sudah diwajibkan, dengan memiliki KIA anak-anak juga bisa mendapatkan diskon dari beberapa UMKM di Bontang," tambahnya.

UMKM yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Disdukcapil di Kota Bontang sudah ada 8 gerai, di antaranya KFC, Pizza Hut, Kenari Water Park, OK Bento dan lainnya. Nantinya anak-anak yang memiliki KIA bisa mendapatkan diskon.

"Jadi diskon-diskon seperti ini nantinya bisa kalau anak-anak mau pakai di gerai-gerai yang ada di Kaltim, yang sudah PKS Disdukcapil. Kami sudah ajukan itu ke daerah Samarinda dan Balikpapan, kalau orang Bontang mau pakai KIA pas liburan di sana bisa," imbuhnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Ketiga pengedar narkoba sudah diamankan.

## Dalam Semalam Tiga Pengedar Narkoba Berhasil Diringkus

BONTANG – Tiga orang tersangka pengedar narkoba berhasil ditangkap dalam waktu semalam oleh Satresnarkoba Polres Bontang. Hal itu diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba Iptu M Yazid.

"Tiga tersangka semua pengedar," ujarnya mengutip dari Polresbontang.com.

Awalnya polisi meringkus warga Berbas Pantai berinisial PE 29 tahun. Tersangka dibekuk di depan halte SMP Negeri 2, Jalan IR H Juanda, Bontang Selatan, pada Selasa (19/9/2023) pukul 00.30 Wita.

Ketika diteledah ditemukan satu bungkus sabu yang digenggam di tangan kiri, dan dua bungkus plastik sabu di saku baju sebelah kiri.

"Saat diinterogasi, dia bilang dapat sabu 1,67 gram itu dari seorang pria," katanya.

Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Bontang melakukan pengembangan kasus dan berhasil meringkus Am (48) pemilik sabu yang sebelumnya hendak diedarkan oleh tersangka PE

Warga Tanjung Laut Indah itu ditangkap pada pukul 01.30 wita di rumahnya bersama barang bukti 19 paket sabu seberat 12,96 gram, uang hasil penjualan Rp300 ribu, timbangan digital, sedotan plastik ujung runcing, bungkus rokok, dan ponsel.

"Semua sabunya disimpan di lemari dalam kamar, disembunyikan di bungkus rokok," sebutnya.

Tak sampai di situ. Polisi juga memburu pemasok sabu untuk Am. Diketahui, belasan paket sabu itu dibeli dari seorang pria dengan sistem jejak di Jalan Poros Bontang-Sangatta, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, pada pukul 05.30, Satresnarkoba Polres Bontang kembali meringkus pengedar sabu yang tak lain pemasok bagi tersangka sebelumnya yakni Am. Su pria 39 tahun warga Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, ditangkap di kediamannya.

Su dibekuk bersama barang bukti dua paket sabu seberat 3,14 gram, uang hasil penjualan senilai Rp500 ribu, ponsel, pipet kaca, dan kertas tisu.

Sabu tersebut dia sembunyikan dalam kertas tisu yang dilakban, kemudian disimpan dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar.

"Dari pengakuannya sabu itu didapat dari seorang pria yang tinggal di Samarinda, sabunya diantar ke Bontang, itu sedang kami dalam," jelasnya.

Akibat perbuatannya, mereka kini ditahan di Mapolres Bontang. Ketiganya dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Editor: Yusva Alam



IST

Pelaku sudah diamankan di Mako Polres Bontang.

## Ketahuan Bawa Sabu, Warga Bontang Baru Diamankan Depan Penginapan

**BONTANG** - Seorang pria warga Bontang Baru ditangkap Satresnarkoba Polres Bontang bersama Satreskrim Polsek Bontang Utara pada sabu, Rabu (20/9/2023) pukul 01.00 Wita.

Pria 28 tahun berinisial TM dibekuk di depan sebuah penginapan di Jalan DI Panjaitan, Api-Api karena terlibat kasus narkoba.

"Kami geledah, dapat dua bungkus sabu dalam rokok, beratnya 0,98 gram," ungkap Kapolres Bontang AKBP Yusep

Dwi Prastiya melalui Kapolsek Bontang Utara, Iptu Tri Soediantoro mengutip dari Polresbontang.com.

Polisi turut mengamankan handphone, bungkus rokok, dan sepeda motor yang digunakan tersangka.

Tersangka juga dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.

**Editor: Yusva Alam**

# DPRD MINTA PENANGANAN ABRASI DERAWAN TANPA GANGGU HABITAT PENYU



**LEGISLATOR MINTA REKRUTMEN  
KARYAWAN DILAKUKAN SATU PINTU**



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendie Lie Jaya.

## DPRD MINTA PENANGANAN ABRASI DERAWAN TANPA GANGGU HABITAT PENYU

**TANJUNG REDEB** - Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendie Lie Jaya menyebut, penanganan abrasi di Pulau Derawan perlu dilakukan kajian mendalam, khususnya soal pemecah gelombang. Jangan sampai merusak habitat penyu yang ada di sana.

Penanganan abrasi di Pulau Derawan menurutnya harus jelas konteksnya ditujukan untuk apa. Jika untuk menyelamatkan pulau dan menjaga aset daerah. Tentunya sangat penting dilakukan sesegera mungkin.

"Kalau soal penyu, habitat aslinya kan di laut dan di darat hanya untuk bertelur saja. Pulau Derawan hanya salah satu pulau yang disinggahi penyu untuk bertelur, masih banyak pilihan pulau lainnya," jelasnya, Rabu (20/9/2023).

Sehingga, penanganan abrasi memang harus diutamakan. Apalagi jumlah penduduk di Pulau Derawan cukup padat. Potensi wisata di sana juga menjadi destinasi unggulan pariwisata domestik. Dengan menyelamatkan Pulau Derawan artinya juga menyelamatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana.

"Memang penanganan abrasi ini urgent untuk diusahakan agar abrasi tidak parah," tegasnya.

Terkait pemecah gelombang, kata dia, san-

gat erat hubungannya dengan penanganan abrasi. Diharapkan, jika memang harus dipasang pemecah gelombang, instansi terkait dapat mengkajinya secara mendalam. Terlebih pemilihan jenis pemecah gelombang yang cocok. Serta, dengan tidak mengganggu jalur bertelurnya penyu di Pulau Derawan.

"Nanti bisa dikaji lagi, misal posisinya di jalur yang tidak dilewati penyu agar tetap bisa lewat," tuturnya.

Wendie menambahkan, habitat penyu selama ini hanya sebagian kecil saja yang ada di Pulau Derawan. Angka harapan hidupnya pun masih lebih tinggi di pulau lainnya. Untuk berkembang biak masih bisa memanfaatkan pulau sekitar Derawan. Seperti Pulau Sangalaki. Yang memang khusus untuk konservasi penyu, bahkan sudah kmenjadi spot pariwisata meskipun terbatas.

"Memang kita lihat di Derawan jumlah penyu bertelur kecil sekali, dibanding pulau lain. Misalnya Pulau Sangalaki," ucapnya.

"Harapannya saat ini penanganan abrasi di Pulau Derawan bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan habitat penyu yang ada di sana," tandasnya.

**Pewarta: Amnil Izza**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

## LEGISLATOR MINTA REKRUTMEN KARYAWAN DILAKUKAN SATU PINTU

**TANJUNG REDEB** - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Berau, Madri Pani menginginkan proses perekrutan karyawan perusahaan di Kabupaten Berau harus satu pintu, yakni melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Hal ini bertujuan agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat optimal.

Dirinya juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi putra daerah, khususnya yang baru lulus kuliah. Sebagai upaya menurunkan angka pengangguran sehingga angka kemiskinan juga bisa ditekan.

Itu disampaikan setelah menghadiri Wisuda Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) ke III di Ball Room SM Tower eks Hotel Makmur. Di mana sebanyak 312 wisudawan dan wisudawati berhasil mendapat gelar sarjana strata satu (S1) dari UMB. Mereka berasal dari tiga program studi yakni, manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan.

Dikatakan Madri, menurunkan angka pengangguran itu menjadi tanggungjawab bersama baik legislatif selaku pendorong dan

penyerap aspirasi masyarakat. Serta eksekutif sebagai pengambil kebijakan. Untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, supaya orangtua tidak merasa sia-sia telah menyekolahkan anak-anaknya.

Dirinya mencontohkan, pekerja dari luar jika ingin bekerja ke Kabupaten Berau harus melalui satu pintu yakni Disnakertrans Berau. Supaya ke depan ada keadilan bagi putra daerah yang ingin mencari pekerjaan di daerah sendiri.

"Jadi anak-anak lokal ini tidak iri, jika ada sub kontraktor suatu perusahaan yang mendatangkan pekerja dari luar," ucapnya.

Jika perekrutan melalui Disnaker tentunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya juga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau. Baik dari kesehatan, pendidikan atau yang lainnya.

"Kalau bisa diwujudkan satu pintu, kiranya terukur otomatis 3 faktor yang bisa kita tekan. Yakni, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Serta oto-

matis kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga berdampak pada stunting yang bisa kita tangani," terangnya.

Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 8 tahun 2018 perihal Perlindungan Tenaga Kerja Lokal perlu diperkuat dengan dibuatkan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup). Sebagai implementasi penerapan Perda tersebut.

"Ada semacam edukasi dan inovasi memberikan suatu kebijakan. Jangan sampai lapangan pekerjaan di Berau yang tinggi tapi justru tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan orang yang baru datang dari luar," paparnya.

Madri cukup prihatin dengan masyarakat lokal yang memiliki KTP dan KK asli Berau tapi justru tidak diprioritaskan. Baik dari pihak ketiga dan sub kontraktornya hingga dunia perhotelan. Makanya perlu ditekan dari sekarang.

"Kasihlah penduduk yang tinggal di Berau seharusnya lebih diprioritaskan oleh semua pihak yang membutuhkan tenaga kerja," tutupnya.

**Pewarta: Amnil Izza**  
**Editor: Nicha Ratnasari**



Kabid Pemerintahan dan Kampung DPMK Berau, Sudirman. (Dezwan/MK)

## PJ TIGA KEPALA KAMPUNG DI BERAU MASIH PROSES

**TANJUNG REDEB** - Menjelang pesta demokrasi 2024, ada empat kepala kampung di Bumi Batiwakkal yang mengundurkan diri untuk bertarung menduduki kursi parlemen.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Sudirman mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah memproses Surat Keputusan (SK) penjabat tiga kampung lainnya.

"Karena Pj Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun sudah dilantik, jadi tinggal tiga kampung lagi yang kami proses SK-nya," terangnya, Rabu (20/9/2023).

Selain Kampung Sei Bebanir Bangun, tiga kepala kampung lainnya yang mengundurkan diri yakni Kepala Kampung Sumber Agung, Long Lanuk dan Labanan Makmur.

"Jadi ada empat kepala kampung yang akan menjadi calon legislatif, satu

orang menuju DPRD Provinsi, sedangkan tiga lainnya DPRD Kabupaten," jelas Sudirman.

Kemunduran empat kepala kampung itu telah disampaikan ke Bupati dan sudah mendapatkan persetujuan. Mengenai Pj Kepala Kampung Sumber Agung, Labanan Makmur dan Long Lanuk, kata Sudirman, akan bekerja hingga Pilkada serentak 2023 nanti.

"Kalau untuk Pj Kampung Sei Bebanir Bangun, jabatannya sampai tahun 2027. Mengenai SK tiga kampung tersebut, masih menunggu. Jika sudah keluar, akan langsung dilantik," paparnya.

Kendati demikian, terkait perbedaan waktu keluarnya SK, Sudirman menyebut dikarenakan waktu pengajuan yang terlambat. Namun, pihaknya mengupayakan akan selesai akhir September ini.

"Kami upayakan September akhir atau awal Oktober nanti sudah kelar ini," tandasnya. (dez)

KORAN **DIGITAL**

**radar.**  
MEDIA  
TERDEPAN

**RADAR PASER**

**EDISI KAMIS**  
21 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

**.COM**



# REPLANTING DI PASER KEMBALI DILANGSUNGKAN



**REALISASI PAJAK KENDARAAN  
DI PASER MASIH 65 PERSEN**



## REPLANTING DI PASER KEMBALI DILANGSUNGKAN

**PASER** – Ratusan hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Kabupaten Paser bakal dilakukan peremajaan atau replanting oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peremajaan sawit akan dilakukan di lahan 254 hektare. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser, Djoko Bawono mengatakan, replanting akan dilakukan setelah penandatanganan kerjasama oleh 3 pihak.

“Penandatanganan itu rencananya akan dilaksanakan di Jakarta antara lembaga pekebun, perbankan, dan BPDPKS,” terang Djoko, Kamis (20/9/2023).

Nantinya, terdapat 16 lembaga petani dari seluruh Indonesia yang akan melakukan penandatanganan kerjasama, termasuk dari Kabupaten Paser. “BPDPKS sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi 254 hektare lahan sawit akan diremajakan,” tambahnya.

Ratusan hektare lahan itu merupakan

lahan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari 100 pekebun. Bantuan peremajaan sawit dari BPDPKS kepada para pekebun di Paser ini, dinilai sangat membantu ekonomi masyarakat.

“Karena sektor perkebunan, menyumbang 8 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Paser, yang salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi daerah,” ulas Djoko.

Sementara untuk industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menyumbang 5 persen PDRB, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang 11 persen PDRB. Berdasarkan data, total kebun sawit yang sudah diremajakan mencapai 7.689 hektar di tahun 2022.

“Kami terus memfasilitasi para pekebun untuk melengkapi persyaratan agar bisa mendapatkan kucuran dana dari BPDPKS, hitungan kami masih ada sembilan lembaga pekebun yang belum mendapat rekomtek replanting dari BPDPKS,” ujarnya. (bs)



Razia pajak kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot.

## REALISASI PAJAK KENDARAAN DI PASER MASIH 65 PERSEN

**PASER** - Realisasi penerimaan pajak kendaraan tengah disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Paser. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut memberikan target.

Pada 2023 ini ditargetkan oleh Bapenda Provinsi Kaltim senilai Rp 80 miliar untuk penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Paser. Hingga medio September masih di angka sekira Rp 52 miliar.

"Sampai saat ini masih 65 persen capaian dari target kami," kata Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Kabupaten Paser, Margo Birawan, Rabu (20/9/2023).

Dijelaskan Margo, terdapat beberapa jenis penerimaan pajak. Di antaranya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau dendanya dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Guna capaian realisasi lampau target, saat ini intens melakukan operasi taat pajak kendaraan.

Berdasarkan catatan pihaknya, hingga September 2023, sekira 300 kendaraan roda dua

dan empat yang terjaring dalam razia pajak kendaraan. Dirinya menyebut langkah tersebut cukup efektif.

Pasalnya, dapat langsung menyelesaikan pembayaran pajak di tempat, karena telah disediakan Samsat Mobile yang standby di lokasi razia. "Kalau tak membawa uang kami buat surat pernyataan dan STNK kita bawa dulu," terangnya.

Selain itu akan melakukan jemput bola, khususnya kendaraan dalam lingkup perusahaan. Ia menyebut telah menyampaikan dan meminta pihak perusahaan untuk mendata kendaraan atau intentaris kantor.

"Sudah kami surati perusahaan-perusahaan. Sampai saat ini masih menunggu datanya ada berapa. Semoga Oktober sudah bisa jalan jemput bola," pungkask dia.

Adapun mekanisme lain dalam jemput bola tak menutup kemungkinan dilakukan. Namun sejauh ini masih dalam pembahasan internal UPTD PPRD Kabupaten Paser, termasuk pihak-pihak yang dilibatkan nantinya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing**  
**Editor : Nicha Ratnasari**



Kendaraan  
pengangkut  
batu bara

## WARGA KELUHKAN ANGKUTAN BATU BARA DI PASER MELINTAS DI JALAN NASIONAL

**PASER** - Aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan akses jalan nasional di Kabupaten Paser, tepatnya dari Kecamatan Batu Sopang menuju Kecamatan Kuaru dikeluhkan warga. Keluhan itu dikarenakan kendaraan bermuatan mengganggu aktivitas pengendara lainnya.

Diketahui, lokasinya berada dari Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang. Gangguan aktivitas yang dikeluhkan warga setempat itu, lantaran truk pengangkut berbondong di jalan yang menanjak dan berliku, membuat sering terjadi kemacetan.

Menanggapi adanya keluhan itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah menyatakan, kewenangan dalam menindak atau menertibkan kendaraan yang melintas di jalan nasional merupakan ranah Pemerintah Pusat.

Inayatullah menambahkan, kewenangan yang merupakan wilayah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI itu memang merupakan masalah yang kerap dihadapi. Kendati begitu, Dishub Kabupaten Paser terus melakukan koordinasi terkait adanya laporan ini.

"Kita sudah koordinasikan dengan Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) terhadap kegiatan itu dan kami ikut bersinergi mendampingi dalam melakukan penindakan dengan melibatkan kepolisian setempat," kata Inayatullah, Rabu (20/9/2023).

Menanggapi penggunaan jalan untuk pengangkutan batu bara menggunakan truk yang melintas, dijelaskan Inayatullah, bahwa tidak ada larangan terhadap angkutan yang menggunakan jalan sepanjang muatannya sesuai dengan kelas jalan.

"Kecuali komoditinya termasuk barang yang berbahaya itu yang harus mendapatkan izin khusus dari Kemenhub dan menurutnya batu bara salah satu komoditas khusus dan tidak termasuk barang berbahaya," ungkapnya.

Untuk diketahui, dahulunya jalan nasional dikawasan tersebut cukup rusak parah namun sudah dilakukan perbaikan sehingga kondisinya kini baik tanpa berlubang. Namun dengan adanya aktivitas angkutan batu bara yang melintas, berpotensi merusak kembali kondisi jalan.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun, jalan yang sudah diperbaiki di kawasan tersebut merupakan jalan yang tergolong kelas 3. Sehingga tidak dapat digunakan untuk pengangkutan batu bara.

"Terkait jalan itu sudah beberapa kali dilakukan penyelidikan dan ketika kita menentukan waktu untuk melaksanakan razia gabungan selalu bocor karena aktivitas tiba tiba sepi, jadi kita masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan penindakan," tuturnya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing**  
**Editor : Nicha Ratnasari**

KORAN DIGITAL

radar.  
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI KAMIS  
21 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



# RATUSAN DRIVER OJEK DEMO, AJUKAN TIGA TUNTUTAN KE PEMPROV KALTIM

MUDA  
BERAHLAK  
AMANAH  
DINAMIS



ARIE  
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA  
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Istimewa

Lakukan aksi damai, driver ojek merasa rugi dengan kebijakan berlaku.

## RATUSAN DRIVER OJEK DEMO, AJUKAN TIGA TUNTUTAN KE PEMPROV KALTIM

**SAMARINDA-** Ratusan driver ojek online (ojol) dan taksi online, yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMBK) melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Ratusan peserta aksi yang tersebar di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, serta Kabupaten Berau.

Kordinator aksi damai Ivan Jaya mengatakan, sejak adanya kebijakan pemerintah naiknya harga BBM pada tahun 2022 lalu. Membuat para driver ojol dan taksi online merasa rugi.

"Kami meminta pemerintah provinsi Kaltim menetapkan surat keputusan Gubernur Kaltim, terkait tarif dasar untuk layanan

jasa pengantaran penumpang bagi driver taksi online (roda empat). Hingga saat ini belum ada kenaikan tarif untuk layanan itu," ungkap Ivan Jaya, di tengah aksi damai, Rabu (20/9/2023).

Lanjut Ivan, driver ojol juga mengeluhkan lantaran pihak perusahaan aplikasi melakukan persaingan tarif tidak sehat dan memangkas tarif dasar driver agar terlihat lebih murah, serta membuat program promosi yang sangat merugikan mitra driver di Kaltim.

Kemudian, meminta Pemprov Kaltim menetapkan peraturan terkait tarif dasar untuk layanan jasa pengantaran makanan dan barang bagi Ojol (roda 2), pasalnya belum memiliki aturan baik ditingkat nasional maupun daerah yang

mengatur jasa layanan tersebut.

"Karena itu pihak perusahaan aplikasi secara bebas saling melakukan persaingan tidak sehat berupa program yang memangkas tarif dasar dan pendapatan driver ojek," ujarnya.

Para driver ojek juga meminta Pemprov Kaltim, untuk segera memberikan sanksi dan menindak tegas perusahaan aplikasi yang beroperasi di daerah Kaltim yang tidak mengikuti peraturan.

"Perusahaan aplikasi yang sangat merugikan pada driver ojek harus segera mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov Kaltim. Semoga aksi damai hari ini bisa disikapi oleh Gubernur Kaltim," pungkas Ivan.

**Pewarta : Nita**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kadishub Kaltim akan buat surat rekomendasi untuk aplikator di Samarinda.

## PROMOSI MERUGIKAN OJOL, DISHUB KALTIM AKAN BERIKAN SANKSI KE APLIKATOR DI SAMARINDA

**SAMARINDA-** Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yudha Pranoto menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan driver ojek online (ojol) di hadapan Kantor Gubernur Kaltim.

Yudha mengatakan, tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor yang diharapkan oleh para driver untuk mengubah peraturan, dianggap keliru.

"Mereka berharap tanda tangan Gubernur Kaltim ini bisa untuk mengubah nasib. Padahal kan' untuk R2 sudah menjadi wewenang kementerian pusat, kita tidak bisa memaksa," kata Kadis Dishub Kaltim Yudha Pranoto, pada Rabu (20/9/2023).

Saat melakukan aksi damai, para driver ojek sempat ricuh dengan sesama driver, untung kejadian tersebut tak berlangsung lama. Dan Gubernur Kaltim Isran Noor tak tampak terlihat menemui driver.

Kata Yudha, seluruh driver ojek di Indonesia memiliki kondisi yang serupa. Tetapi, untuk tarif tidak bisa disamakan dengan daerah di luar Kota Samarinda.

"Memang tidak bisa disamakan tarif di Samarinda dengan di luar kota, misalnya Jawa

di sana dari harga sembako saja sudah jauh beda. Kita juga sebenarnya turut prihatin dengan kondisi driver yang digencet oleh promosi-promosi yang dibuat oleh perusahaan aplikasi," imbuhnya.

Diketahui, Gubernur Kaltim telah bersurat kepada menteri untuk memberikan penyesuaian tarif.

"Surat rekomendasi yang dikirim ke kementerian berisi untuk pemberlakuan tarif pengantaran barang atau makanan, kedua penghapusan promo-promo," kata Yudha.

Driver ojek juga meminta agar perusahaan aplikasi mendapatkan sanksi tegas, dan menghapuskan promosi-promosi yang merugikan driver ojek.

"Kalau memberikan sanksi kita bisa, tapi hanya sebatas kemampuan kita karena aplikator pusatnya di Jakarta. Dan 2x24 jam memberikan teguran untuk memberhentikan promo itu, nanti kita buat suratnya untuk aplikator. Ini sudah menjadi regulasi Dinas Perhubungan Kaltim. Serta kami akan bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim," tutupnya.

**Pewarta : Nita**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat

## PENELUSURAN BAWASLU KALTIM SELESAI: NYATAKAN TAK ADA PELANGGARAN PENGUMPULAN KTP OLEH SINTA ROSMA YENTI

**SAMARINDA** - Perkembangan terbaru, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung dugaan pelanggaran pemilu terkait instruksi pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga dilakukan oleh Sinta Rosma Yenti, Bakal Calon Anggota DPD Kaltim, kepada aparat Desa/Kelurahan dan Ketua RT/RW di Kabupaten Paser.

Pengumpulan KTP warga oleh istri Bupati Paser ini diduga digunakan untuk persyaratan mendapatkan dukungan pemilih dalam Pencalonan Anggota DPD Kaltim pada Pemilu 2024.

“Hasil penelusuran kami tidak menemukan adanya satu perbuatan dugaan pelanggaran pemilu terkait instruksi pengumpulan KTP. Kami telah melakukan wawancara, menghubungi sumber informasi, dan memeriksa fakta-fakta terkait, dan tidak ada bukti yang dapat mengkonfirmasi dugaan tersebut,” beber Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, dalam siaran persnya yang

diterima Redaksi Mediakaltim.com, Rabu (20/9).

Pernyataan ini mengakhiri penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kaltim beberapa minggu terakhir, yang melibatkan berbagai pihak terkait informasi yang berkembang di media sosial mengenai instruksi tersebut.

Meskipun informasi ini telah menarik perhatian publik, hasil penelusuran Bawaslu menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut tidak terbukti.

Dalam konteks ini, Bawaslu Kaltim kembali mengingatkan dan mengimbau semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk Kepala Daerah, Partai Politik Peserta Pemilu, dan masyarakat, untuk mematuhi tata cara dan prosedur yang berlaku dalam setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan transparansi dan integritas sebagai prinsip utama, Bawaslu berkomitmen menjaga kelancaran dan keadilan dalam proses Pemilu yang akan datang,” tegasnya. (MK)

**Pewarta/Editor: Agus Susanto**



Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono

## TIGA PERUSDA KEMBALI DAPAT SUNTIKAN MODAL, KETUA KOMISI II HARAP KONTRIBUSI PAD MENINGKAT

**SAMARINDA** - Tiga Perusahaan Daerah (Perusda) kembali mendapat tambahan penyertaan modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

Tiga perusda tersebut dimaksud yakni PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara sebesar Rp3,55 triliun, PT Melati Bhakti Satya (MBS) sebesar Rp18,8 miliar dan PT Jamkrida yang menerima penambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar.

Menanggapi, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Nidya Listiyono, berharap penambahan penyertaan modal ini dapat menunjang kinerja para Perusda tersebut. Selain itu dengan adanya suntikan dana, tiga Perusda tersebut mampu mengembangkan jaringan yang dapat berimplikasi pada kontribusi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harapannya penambahan ini bisa

membuat perusahaan semakin bertumbuh baik dan bisa berperan lebih terhadap pendapatan daerah," jelasnya via telepon, Rabu (20/9/2023).

Terkhusus untuk PT. Bank Kaltimtara, penyertaan modal merupakan pemenuhan modal dari Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham terbesar dengan 51%. Dengan besarnya suntikan modal ini, Politisi Golkar tersebut berharap dapat berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja yang semakin baik dengan terus berinovasi.

"Kita berharap peningkatan pemberdayaan potensi UMKM dan wiraswasta baru, juga agar PT. BPD Kaltim Kaltara dapat meningkatkan pelayanan kepada para nasabah khususnya layanan e-banking, ATM dan kehandalan teknologi jaringan," tutupnya.

**Pewarta : Andi Desky**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

## HASANUDDIN MAS'UD OPTIMIS PJ GUBERNUR MERUPAKAN SALAH SATU DARI USULAN DPRD KALTIM

**SAMARINDA** - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yakin bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kelak merupakan salah satu nama usulan dari "Karang Paci". Meskipun bila menengok pengangkatan Pj Bupati Penajam Utara (PPU), bukan salah satu nama usulan DPRD PPU.

DPRD Kaltim telah mengirim lima nama rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. Mekanisme penetapan lima nama usulan DPRD Kaltim sendiri berdasar hasil usulan dari tiap fraksi DPRD Kaltim.

Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Lima nama yang diusulkan DPRD Kaltim yakni, Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Otda

Kemendagri Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni serta Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur.

"Sudah kirimkan 5 nama dan 3 diantaranya kita rengking tertinggi. Kita tetap optimis nama yang terpilih untuk Pj Gubernur Kaltim salah satu yang kita kirimkan sebagai usulan," ucap Politisi Golkar tersebut, Rabu (20/9/2023).

Sebagai informasi Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Makmur Marbun, didapuk mengemban tugas sebagai Pj Bupati PPU.

Nama Makmur Marbun tidak tercatat sebagai usulan DPRD PPU kepada Pemprov Kaltim. Usulan DPRD PPU yakni Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Sedangkan dua kandidat lainnya adalah Suhardi, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar, yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik di Sekretariat Pemda PPU. **(eky)**